

INTISARI

Kemiskinan merupakan permasalahan serius yang dihadapi oleh Indonesia sejak dahulu. Berbagai upaya penanggulangan kemiskinan telah dilakukan namun belum efektif untuk memecahkan masalah kemiskinan. Lahirnya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa menjadi angin segar bagi upaya pemecahan kemiskinan di Indonesia. Dana Desa (DD) sebagai bagian dari UU tersebut, mendorong Desa menjadi mandiri dalam membangun wilayahnya sendiri. Arah dan pokok kebijakan DD tahun 2018, salah satunya yaitu memberikan fokus yang lebih besar pada pengentasan kemiskinan dan ketimpangan. DD dan sumber pendapatan lain berada dalam satu wadah yaitu Keuangan Desa. Oleh karena itu, tata kelola keuangan desa sangat mempengaruhi kondisi kemiskinan di desa tersebut.

Desa Sidorejo merupakan wilayah terluas dan memiliki persentase kemiskinan tertinggi dalam wilayah Kecamatan Godean. Oleh karenanya, Sidorejo memperoleh anggaran DD yang cukup besar. Sebagai desa terluas, Sidorejo memiliki banyak potensi yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengelolaan keuangan desa dan mengetahui kontribusinya dalam memecahkan masalah kemiskinan di Desa Sidorejo.

Teori yang digunakan peneliti untuk memperdalam pengelolaan keuangan desa yaitu teori *good governance* dari UNDP yang terdiri dari delapan prinsip yaitu partisipatoris, penegakan hukum, transparansi, daya tanggap, konsensus, persamaan hak, efektivitas dan efisien, serta akuntabilitas. Sedangkan untuk memperdalam isu kemiskinan peneliti menggunakan konsep kemiskinan menurut Ellis yang terdiri dari kemiskinan material, kemiskinan kultural, dan kemiskinan struktural. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Lokasi penelitian di Desa Sidorejo, Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman, dengan unit analisa adalah masyarakat desa. Teknik penentuan informan dengan *purposive sampling*. Teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dokumentasi, dan kepustakaan.

Hasil penelitian ini adalah tata kelola keuangan desa yang dilakukan oleh pemerintah desa belum mampu memecahkan masalah kemiskinan di Desa Sidorejo. Hal ini disebabkan oleh tata kelola keuangan desa yang kurang baik karena kurang dapat memenuhi seluruh prinsip *good governance*. Pengelolaan keuangan desa juga belum diarahkan untuk mengatasi masalah kemiskinan dan lebih berfokus pada pembangunan fisik. Program kemiskinan desa hanya sebatas pendataan dan pelatihan namun intensitasnya tergolong kurang. Selain itu, Tim Penanggulangan Kemiskinan (TPK) Desa juga belum bekerja secara maksimal untuk mengatasi masalah kemiskinan di desa. Pemanfaatan potensi desa juga kurang optimal dilakukan, karena Sidorejo belum memiliki BUMDes yang mampu mengoptimalkan pemanfaatan potensi desa dengan berbasis pada ekonomi rakyat. Oleh karenanya kemiskinan belum dapat teratasi, terutama kemiskinan kultural dan struktural.

Kata kunci : Kemiskinan, Tata Kelola, Keuangan Desa

ABSTRACT

Poverty is a serious problem faced by Indonesia long ago. Various poverty reduction efforts have been made but have not been effective to solve the problem of poverty. The birth of Law No. 6 of 2014 concerning villages became a fresh air for efforts to solve poverty in Indonesia. Village Fund (DD) as part of the Law, encourage villages to become independent in developing their own territory. One of the directions and main policy of DD in 2018 is to give a bigger concentration on poverty alleviation and inequality. DD and the other sources of income are in one framework named Village Finance. Therefore, village financial management give an impact to the conditions of poverty in the village.

Sidorejo Village is the largest area and has the highest percentage of poverty in the Godean District area. Therefore, Sidorejo get a sizeable DD budget. As the largest village, Sidorejo has a lot of potential that can be utilized for the welfare of the society. This study aim to look at village financial management and to discover the contribution in solving poverty problems in Sidorejo Village.

Researcher use theory of good governance from UNDP to deepen village financial management with several principles such as participatory, rule of law, transparency, responsiveness, consensus, equality of rights, effectiveness and efficiency, and accountability. While to deepen the issue of poverty researchers use the concept of poverty according to Ellis such as material poverty, cultural poverty, and structural poverty. The method used in this study is qualitative descriptive. The location of study was in Sidorejo Village, Godean District, Sleman Regency, with the analysis unit is the villagers. The technique of informant determination is purposive sampling. The technique of collecting data are observation, interviews, documentation, and literature.

The results of this study are the village financial management done by the village government has not been able to solve the problem of poverty in the village of Sidorejo. This is caused by low village financial management because can not to fulfill all the principles of good governance. Village financial management has also not been directed to solve the problem of poverty and its more focused on physical development. The village poverty program is just about collecting data and training, but the intensity of the training is still less. In addition, Village Poverty Alleviation Team (Village TPK) has not yet worked optimally to solve the problem of poverty in the village. Utilization of village potential is also less than optimal, because Sidorejo does not have yet a BUMDes that is able to optimize the utilization of village potential based on the people's economy. Therefore poverty not resolved yet, especially cultural poverty and structural poverty.

Keywords: Poverty, Governance, Village Finance